

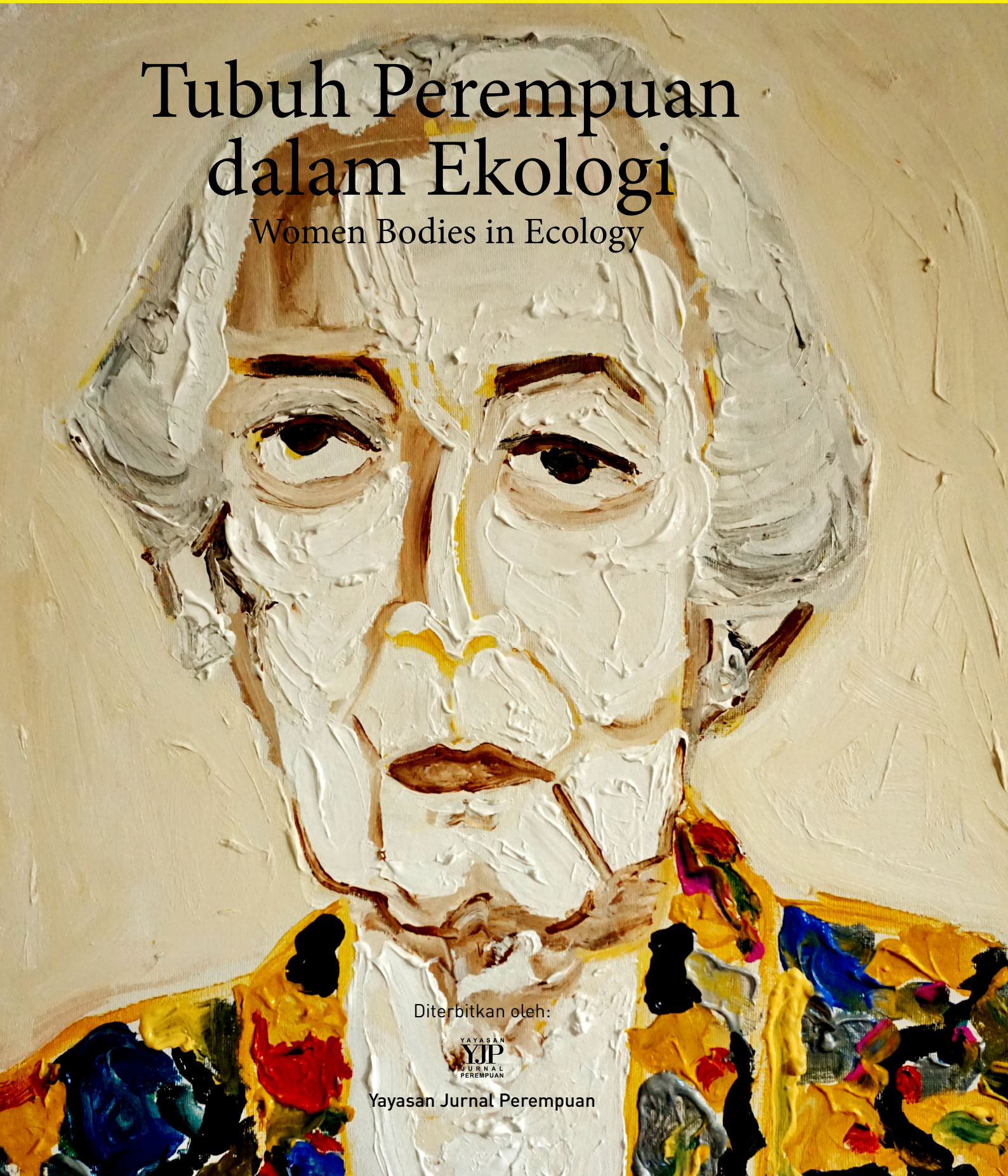
Tubuh Perempuan dalam Ekologi

Women Bodies in Ecology

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

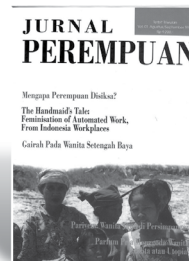
Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

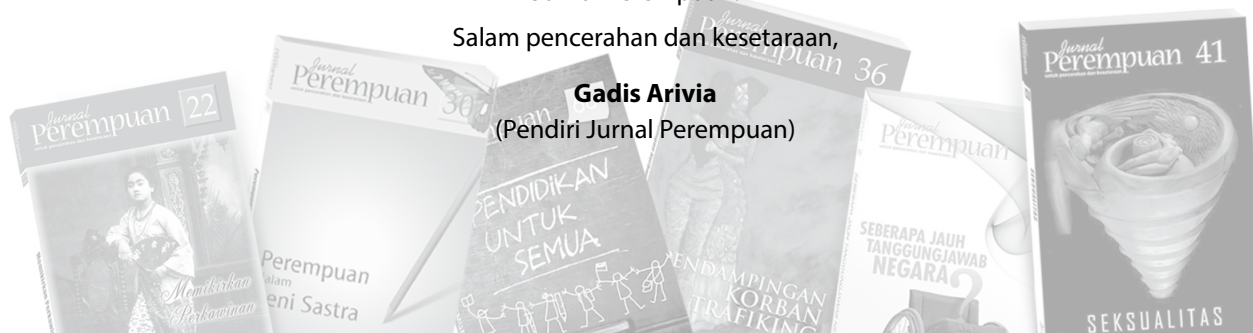
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2014



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: "Tiga Tubuh Tanah"	iii-iv
Artikel / Articles	
• Teologi Ekofeminis Pembebasan dari Porong: Kajian Puisi Anak-Anak Korban Lapindo / <i>Ecofeminist and Freedom Theology from Porong: a Study on Poetries Compilation by Children of Lapindo's Victims</i>	1-8
<i>Mutiara Andalas, SJ</i>	
• Ancaman Kerusakan Ekologis Produksi Batik Rumahan: Narasi Perlindungan Ruang Domestik <i>Threat of Ecological Destruction in Home-Based Batik Production: a Narrative of Protecting Domestic Sphere</i>	9-20
<i>Arianti Ina Restiani Hunga</i>	
• Goddess, Ketubuhan dan Alam: Kajian Spiritualitas Ekofeminisme / <i>Goddess, Corporeality and Nature: Study of Ecofeminist Spiritualism</i>	21-28
<i>Gadis Arivia</i>	
• Ketegangan Ruang Privat dan Publik dalam Penyelamatan Ekologi: Negara, Perusahaan dan Perempuan Adat / <i>Tension between Private and Public Sphere in Saving Ecology: State, Companies and Indigenous Women</i>	29-36
<i>Donny Danardono</i>	
• Perlawanan Perempuan dalam Industri Kapas: Kajian Kerusakan Lingkungan di Sumba Timur / <i>Women's Resistance in Cotton Industry: a Study of Ecological Destruction in East Sumba</i>	37-49
<i>R.L.K.R. Nugrohowardhani</i>	
• Kerentanan Ekologi Kota: Narasi Buruh dan Pekerja Informal Perempuan / <i>Vulnerability of City Ecology: a Narrative of Female Labors and Informal Workers</i>	51-58
<i>Akhmad Ramdhon</i>	
• Ketika Banteng-Banteng Tak Lagi Minum Air di bawah Pohon Keningar: Pandangan Dunia Perempuan Lereng Gunung Merapi / <i>When Bulls No Longer Drink Water under Keningar Trees: Women's Worldview at Mount Merapi</i>	59-66
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Siti Maemunah: Filosofi Tanah sebagai Tubuh Perempuan: Krisis Lingkungan akibat Tambang / <i>Siti Maemunah: Land Philosophy as Women's Body: Ecological Crisis due to Mining</i>	67-74
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono & Naristi Aulia</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	75-76
Resensi Buku/ Book Review	
• Indonesia dalam Kajian Ekofeminisme Multidisipliner / <i>Indonesia Under the Eyes of Multidisciplinary Ecofeminist Studies</i>	77-79
<i>Ngadiyo</i>	

“Tiga Tubuh Tanah”

Lukisan yang menjadi cover Edisi No 80 *Tubuh Perempuan dalam Ekologi* kali ini adalah “Tiga Tubuh Tanah” (akrilik di atas 140cmx140cm kanvas, tahun 2013) karya Idris Brandy. Tanah yang melahirkan segala makanan melalui tumbuhan dan mengandung air untuk tubuh, demikian juga, tubuh-tubuh bangkai yang memberikan gizi kesuburan pada tanah setelah kematiannya. Tubuh dan tanah adalah dua perihal yang merupakan rangkaian reinkarnasi dan melambangkan keterhubungan yang lekat. Seharusnya antara keduanya tak ada hirarki. Tetapi kebudayaan manusia meniscayakan di dalam dirinya fasisme manusia atas alam, hirarki tubuh atas tanah. Dan dia meletakkan tanah, binatang, perempuan dalam sistem “pelayanan” (*services*) atas idealitas kemanusiaan dan sebagai “sumber daya” (*resources*). Hubungan yang setara antara tubuh dan tanah, sebelumnya, tak lagi setara. Bahkan, binatang dan perempuan, dicap sebagai liar dan buas. Maka perlu ditundukkan, diatur, dan dieksploitasi sesuai dengan kebutuhan peradaban. Kata-kata “buas” dan “predator”, bahkan disematkan sebagai bentuk reduksi dan negativitas atas fungsi penting mereka terhadap keseimbangan alam. Peradaban mengenal makian-makian berikut: *Dasar Anjing! Son of a Bitch! Lonthe! Asu!* Bahkan tahi manusia yang menyuburkan juga menjadi basis makian dalam *Shit!* Bahasa manusia dibentuk berdasarkan pola-pola kekuasaan yang *top-down* dan hirarkis, dimana mekanisme, fantasi, dan subjektivitas manusia dibangun atas “bahaya” dan “ancaman” dari alam, binatang buas dan perempuan. Dus lahirlah diksi “bencana alam”. Dus hewan yang liar dan berbahaya, dalam hal ini adalah juga perempuan (misalnya melalui sunat), perlu dijinakkan, atau jika perlu diberangus supaya tidak membahayakan peradaban – kita mengenal beberapa

banyak hewan mulai menjelang punah, sebagai contoh Harimau Sumatera, Serigala Siberia, Cheetah Iran, berbagai Burung Tropis Eksotis dan masih banyak lagi. Konsepsi reduksionis ini telah membawa ikutan-ikutan dan resiko ketidakseimbangan alam yang justru membawa ancaman dan kerusakan ekologis. Sifat-sifat keberbahayaan hewan telah menjustifikasi manusia untuk melakukan eksploitasi masif demi perikehidupan dan kemakmuran peradaban sang manusia.

Sebelumnya spesies manusia mengenal baik kondisi alam dan tanda-tandanya ketika alam mengabarkan berita-beritanya kepada manusia. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya manusia dengan peradaban, dengan kebudayaannya, manusia semakin jauh dari alam. Spesies manusia membangun kebudayaan tanpa alamnya (*culture without nature*), dan manusia tak lagi sensitif terhadap suara alam. Bahkan pandangan dunia manusia telah menghilangkan alam dalam *axis mundi*-nya. Alam tak lagi pusat wacana manusia. Manusia lah, yang sekarang, menjadi pusat wacana bagi ekosistem. Dan lebih mengerikan, manusia menolak tubuhnya sendiri, dan hidup secara tidak organik. Manusia tergantung pada mesin-mesin, pada obat-obat, pada alat-alat, dan tubuh manusia berubah menjadi perkakas bagi egonya. Visi ini menjadi demikian destruktif terutama di negara-negara yang sedang berkembang, yang dilimpahi dengan kekayaan alam tak terbatas, seperti Indonesia. Tahun 2013 ini catatan kehilangan hutan di Indonesia merupakan catatan kehilangan terbesar dalam abad ini. Semuanya dipicu oleh pandangan dunia manusia yang tak lagi menjadikan alam sebagai pusat wacana karena alam adalah sumber kapital, tak lebih, tak kurang. Ini adalah kejahatan yang tak terpemerikan, yang

tak terpeleceh lagi, karena sesungguhnya manusia tak memiliki kesanggupan mengganti hutan itu, secara keseluruhan, dalam hitungan hidupnya. Manusia butuh generasi bergenerasi untuk dapat menumbuhkan kembali hutan. Ratusan tahun lamanya—minimal 300 tahun untuk membuat tanah subur kembali, dan manusia tak mampu melakukannya sendirian kecuali bahwa dia menitip warisan kepada anak cucunya untuk melakukan itu secara berjenjang, secara bergenerasi. Sementara peradaban manusia merusak kesuburan tanah hanya dalam hitungan hari, bahkan detik!

Eksploitasi berlebih atas Bumi, atas Alam, juga piaraan atas hewan dengan cara-cara tak “manusiawi” (“hewani”) merupakan penanda bagaimana spesies manusia tak lagi mengenal tubuhnya sendiri sebagai salah satu spesies binatang yang tak bisa hidup tanpa mereka. Tubuh manusia, sekuatnya, adalah tubuh yang hidup dalam harmoni dengan alam. Tubuh-tubuh manusia sekarang

berubah menjadi perkakas, menjadi mesin, bagi egonya, yang tak lagi digubris atau diurus oleh akal manusia sendiri untuk hidup alamiah bersama alam, bersama binatang, bersama ekosistem. Dus ada persoalan politis yang masuk dalam kesadaran ekologis manusia ketika itu menyangkut pandangan dunianya. Kesadaran ini tidak bisa dibangun tanpa membangun terlebih dahulu konstruksi alam dan deklarasi kesaling-tergantungan manusia (*intra-inter-dependence*). Rekonsiliasi antara manusia dan non manusia dan kekuasaan hegemonik spesies manusia ini sudah terbangun demikian kuat dalam struktur sains modern, dimana ilmu pengetahuan menjadikan alam sebagai “objek penelitian”, kemudian “objek eksploitasi” karena dia menawarkan “kapital”. Pengalaman-pengalaman spiritual atas alam, sensitifitas manusia atas alam, kemudian tak lagi masuk dalam hitungan nomenklatur kebudayaan dari berpengetahuan. Tubuh—sebagai manifestasi tanah—tak lagi bermakna bagi manusia, selain sebagai kapital dan perkakas ego. (Dewi Candraningrum)

Mutiara Andalas, SJ, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002, Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383

Teologi Ekofeminis Pembebasan dari Porong: Kajian Puisi Anak-Anak Korban Lapindo

Ecofeminist and Freedom Theology from Porong: a Study on Poetries Compilation by Children of Lapindo's Victims

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 1-8, 4 daftar pustaka.

This paper investigates poetries written by children victims of Lapindo narrating their suffering in speaking against the corporation and government's indifferent. Those poetries exemplify and amplify the meaning of sisterhood among human being, ecology and its surrounding ecosystem in the tragic way. The children expose greediness as part of contemporary sin in connection to economic dimension. The aggression against women is similar with the aggression against the nature. This paper concludes that intellectus fidei will transform the practice of intellectus liberationem.

Keywords: children, poetry, Lapindo, ecofeminist liberation theology.

Tulisan ini mengkaji puisi anak-anak manusia lumpur yang mengisahkan penderitaan dan perlawanan mereka di hadapan mangkirnya korporasi Lapindo dari tanggung jawab dan kebungkaman pemerintah pasca tragedi. Puisi-puisi mereka mengisahkan persaudaraan antar manusia lumpur, juga dengan flora dan fauna di sekitar lokasi tragedi. Anak-anak manusia lumpur juga mengangkat keserakahan sebagai haram, bahkan dosa kontemporer dalam ranah ekonomi. Teolog ekofeminis pembebasan memahami tragedi lumpur Lapindo sebagai kisah anti penciptaan. Serangan kehidupan terhadap perempuan memiliki keserupaan dengan kerusakan ekologis yang diderita akibat tragedi lumpur Lapindo. Berangkat dari konteks lumpur Lapindo, teologi mengalami transformasi dari definisi klasiknya sebagai ilmu iman (intellectus fidei) menjadi ilmu yang mendorong pada praksis pembebasan (intellectus liberationem).

Kata Kunci: puisi anak, korporasi Lapindo dan teologi ekofeminis pembebasan.

Arianti Ina Restiani Hunga, Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Ancaman Kerusakan Ekologis Produksi Batik Rumah: Narasi Perlindungan Ruang Domestik

Threat of Ecological Destruction in Home-Based Batik Production: a Narrative of Protecting Domestic Sphere

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 9-20, 45 daftar pustaka.

Shifting the location of Batik production from factory to home has manipulated the livelihood of domestic arena and its livelihood. This has deteriorated the ecological support of the house by its chemical-based batik pollutants. It then created problems such as diseases, clean water scarcity and problems of pollution, air pollution, and the consumption of drug to boost their stamina in producing Batik. The economic cost is also another burden since the production cost such as water, electricity, and space are not the responsibility of the boss but the home workers. The health and social cost is high and creating multiple ecological, psychological, and social impairments. The previous problem has enacted

many women to create eco-friendly batik production.

Keywords: women, domestic area, eco-friendly batik, ecology.

Modus produksi pabrik masuk dalam rumah tinggal (arena domestik) telah memanipulasi dan merusak ruang dan aktifitas reproduktif dalam rumah. Kondisinya semakin parah karena dampak produksi batik tidak hanya bermakna ekonomi tetapi juga lingkungan berupa limbah yang berdampak pada lingkungan rumah menjadi kumuh dan tercemar limbah; penyakit karena pencemaran air dan udara, serta penyakit lain karena mengkonsumsi obat-obatan stamina untuk mengejar dead line dan target produksi industri. Pemindahan modus produksi ini menciptakan beban ekonomi yang terkait dengan pengadaan alat produksi, bahan produksi, bahan pendukung produksi (air, listrik, tempat, dll) tetapi juga biaya sosial dan kesehatan. Beban ini semakin berat karena upah yang diberikan juga sangat kecil karena diberikan dalam bentuk satuan, bijian dan satuan lainnya (borongan) dan semua berlangsung tanpa jaminan apapun. Munculnya krisis lingkungan, kesadaran global akan bahaya limbah produksi, dan kesadaran akan konsumsi barang yang ramah lingkungan merupakan suatu peluang positif bagi implementasi batik ramah lingkungan.

Kata Kunci: perempuan, arena domestik, batik ramah lingkungan, ekologi.

Gadis Arivia, Departemen Filsafat Universitas Indonesia
Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528,
+62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Goddess, Ketubuhan dan Alam: Kajian Spiritualitas Ekofeminisme

Goddess, Corporeality and Nature: Study of Ecofeminist Spiritualism

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 21-28, 18 daftar pustaka.

This paper investigates the alternative spirituality based on ecofeminism, meaning excavating the feminine spirituality before the birth of monotheism. Feminine spirituality exposed the female god, that is Goddess even before the pre-(his)tory. Faith on the existence of Goddess were not only existed within the Egypt, Greek, and the West but also in ancient Indonesia. Ecofeminist spirituality connected the spirit of the Nature, Wo-men corporeality and female sexuality.

Keywords: Goddess, corporeality, fe-male, nature.

Tulisan ini menyajikan pemikiran feminis tentang spiritualitas alternatif, yaitu bukan berpijak pada monoteisme melainkan menonjolkan sisi feminin spiritualisme. Sisi feminin spiritualisme berusaha menampilkan sosok Tuhan Perempuan yang telah berlangsung sejak zaman pra-sejarah. Eksplorasi keimanan pada zaman pra-sejarah khususnya mengenai Goddess (Tuhan Perempuan) ditemukan jejaknya bukan saja di dalam budaya Yunani, Mesir dan Barat, melainkan juga di Indonesia yang akrab disebut dengan pemujaan terhadap sang Dewi. Sisi feminin spiritualisme merupakan landasan bagi ekofeminisme yang menghubungkan spiritualisme dengan alam dan sarat dengan ketubuhan dan seksualitas perempuan.

Kata Kunci: Goddess, ketubuhan, perempuan, alam.

Donny Danardono, Fakultas Hukum & PMLP (Program Magister Lingkungan dan Perkotaan) Universitas Katolik Soegijapranata Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang 50234, Telp. 024-8441555, 8505003 (hunting), Fax. 024-8415429, 8445265

Ketegangan Ruang Privat dan Publik dalam Penyelamatan Ekologi: Negara, Perusahaan dan Perempuan Adat

Tension between Private and Public Sphere in Saving Ecology: State, Companies and Indigenous Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 29-36, 10 daftar pustaka.

This paper examines the tension between private and public sphere in deciding women's role against ecological crisis. State, companies, traditional tribe-based women alliance, village women have their own perception and definition in projecting to save the ecology. Private sphere is where women construct their identity, transmitted ecological spirit to their children, according their phantasy of beauty and fashion based on ecological-friendly product, etc. Public sphere is where women campaign explicitly against company that destroy their environment as form of ecological and gender injustice. The urge to protect the ecology, for women, means the dealing of the tension between domestic and public spheres.

Keywords: dichotomy, private-public sphere, gender and ecological injustice.

Tulisan ini membahas ketegangan dualisme ruang privat dan ruang publik yang muncul dalam penetapan peran perempuan untuk mengatasi krisis lingkungan yang dibuat oleh negara, perusahaan, perempuan adat, dan perempuan desa. Ruang privat adalah tempat seseorang mengkonstruksikan identitasnya. Penetapan identitas perempuan sebagai ibu rumah tangga, penyuka kecantikan, *fashion* dan belanja dilakukan di ruang privat. Sementara ruang publik adalah tempat mempersoalkan berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakadilan lingkungan. Karena itu tuntutan pada perempuan untuk peduli pada lingkungan pada dasarnya merupakan tuntutan yang bermain di antara kedua ruang itu.

Kata kunci: dikotomi, ruang privat, ruang publik, ketidakadilan gender, ketidakadilan lingkungan.

R.L.K.R. Nugrohowardhani, STIE KRISWINA Sumba
Jln. R. Suprpto No. 35. Waingapu Waingapu – Sumba Timur -
NTT | Telp : (0387) 62 392, 62 393, Fax: (0387) 62 644

Perlawanan Perempuan dalam Industri Kapas: Kajian Kerusakan Lingkungan di Sumba Timur

Women's Resistance in Cotton Industry: a Study of Ecological Destruction in East Sumba

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 37-49, 42 daftar pustaka.

National Cotton Acceleration Program (NCAP) being incepted in East Sumba since 2008 has created resistances among women farmers in Tanamanang Village. Forms of resistances are as follows: first they called the cotton as "project cotton" representing a symbolic resistance with negative connotation in speaking against the government project by reducing the existence of the word into "project"—no more no less. The second resistance is open-resistance in which they break the rules of planting-time, harvesting-time, and all the promises being signed before between the government and the farmers. The third resistance is by rejecting the program being incepted into their land. They openly say no to the planting of cotton in their front-back yard.

Keywords: women, cotton, resistance, ecofeminism.

Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2008 menyebabkan munculnya

resistensi perempuan petani di Desa Tanamanang. Ada tiga bentuk resistensi, yaitu: 1) adalah menyebut kapas PAKN sebagai "kapas proyek" (*kamba proyek*). Sebutan ini bisa digolongkan dalam salah satu bentuk resistensi simbolik karena kata "proyek" yang melekat pada sebutan itu berkonotasi negatif. 2) Resistensi terbuka karena perilaku itu dapat diamati dan tampak dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dalam konteks pelaksanaan PAKN di Desa Tanamanang, resistensi perempuan dilakukan dengan cara melanggar aturan dalam pelaksanaan PAKN, yaitu melanggar aturan tanam dan melanggar kesepakatan dalam penjualan hasil panen kapas. 3). Resistensi asersi karena terkait dengan tuntutan petani perempuan pada pelaksanaan PAKN di desanya. Daripada bertahan menjadi kelompok tani percontohan, mereka menolak lahan mereka untuk dijadikan demonstrasi plot bagi pengembangan kapas.

Kata Kunci: perempuan, kapas, resistensi, ekofeminisme.

Akhmad Ramdhon, Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta 57126. Telephone : +62
271 663483 / +62 271 648379, Fax : +62 271 648379

Kerentanan Ekologi Kota: Narasi Buruh dan Pekerja Informal Perempuan

Vulnerability of City Ecology: a Narrative of Female Labors and Informal Workers

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 51-58, 30 daftar pustaka.

Cities and women have experienced the most vulnerable condition under the premise of economic development specifically those living in poverty. Women working in informal sectors are portrait of vulnerable family in cities where men as breadwinner sometimes unable to fulfill the financial basis. They then have to take the risks of living in slum areas in a prohibited territorial area that unable providing basic needs such as clean water, good air ventilation, sanitation, air circulation, and public or common room. Accumulation of this migration to cities has transformed cities into the most vulnerable place to live for those having no money—gentrification.

Keywords: vulnerability, ecology, city, female labours.

Kota dan buruh murah perempuan banyak menanggung beratnya keterbatasan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keluarga miskin perkotaan. Perempuan yang bekerja di sektor informal perkotaan adalah sisi lain dari potret keluarga miskin, dimana para lelaki yang menjadi kepala rumah tangga juga bekerja di sektor yang sama. Mereka harus mengambil resiko untuk hadir di pinggir-pinggir jalan serta hidup dalam lingkup teritori yang penuh jejaring keterbatasan atas hak-hak dasar. Status illegal dibidang ekonomi, dalam banyak hal juga berlaku untuk status kepemilikan tempat tinggal. Area tempat tinggal yang minim fasilitas air bersih, sanitasi, sirkulasi udara, hingga ruang-ruang publik menjadi kantong-kantong kaum miskin kota. Akumulasi yang terjadi terus-menerus dari sisi kuantitas manusia yang bergerak ke kota tak sebanding dengan kapasitas ruang ketersediaannya (*gentrification*). Ruang-ruang yang sempit, saluran irigasi yang rusak, jalanan yang tak memadai, fasilitas publik yang minim menjadi resiko untuk bertahan hidup dalam beragang keterbatasan.

Kata Kunci: kerentanan, ekologi, kota, buruh perempuan.

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah
57102

**Ketika Banteng-Banteng Tak Lagi Minum Air di bawah
Pohon Keningar: Pandangan Dunia Perempuan Lereng
Gunung Merapi**

***When Bulls No Longer Drink Water under Keningar Trees:
Women's Worldview at Mount Merapi***

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 1, Februari 2014, hal. 59-66, 1 gambar, 2
tabel, 14 daftar pustaka.

Women of Merapi have a distinct myth regarding Mount Merapi, calling it as "her" Mother. Signs of over-exploitation in the area of Merapi (illegal logging and illegal mining) are challenged by the whole village members of Keningar located less than 7 km from the volcanic mouth. This inclusion of Mt Merapi in the narrative of myth with Keningar communities not only allows for a wider set of experiences from which to draw in generating value claims, but also provides important opportunities for reconstituting their ecological identities. This inclusive community forces everyone in it to reassess their relationship to each other and the natural world by paying deep respect for the existence of natural identity.

Keywords: mount Merapi, worldview, myth, ecological identity.

Perempuan Merapi memiliki mitos tersendiri perihal Gunung Merapi, memanggilnya sebagai "ia sang Ibu". Eksploitasi berlebih atas area Merapi, yaitu penebangan liar dan pertambangan tak berijin, telah ditantang oleh warga sekitar Desa Keningar, kurang dari 7 km dari puncak Merapi. Inklusi narasi dongeng Merapi sebagai ibu dalam komunitas perdesaan Merapi merupakan penanda penting klaim identitas ekologis warga desa. Dengan penghidupan mitos ini kemudian setiap warga melakukan refleksi ulang atas makna identitas dan penghormatan pada alam.

Kata kunci: Gunung Merapi, pandangan dunia, mitos, identitas ekologi.

Perlawanan Perempuan dalam Industri Kapas: Kajian Kerusakan Lingkungan di Sumba Timur

Women's Resistance in Cotton Industry: a Study of Ecological Destruction in East Sumba

R.L.K.R. Nugrohowardhani

STIE KRISWINA Sumba

Jln. R. Suprpto No. 35. Waingapu Waingapu – Sumba Timur - NTT | Telp : (0387) 62 392, 62 393, Fax: (0387) 62 644

nugrohowardhani@gmail.com

Naskah Diterima 6 Desember 2013. Direvisi 14 Desember 2013. Disetujui: 11 Januari 2014

Abstract

National Cotton Acceleration Program (NCAP) being incepted in East Sumba since 2008 has created resistances among women farmers in Tanamanang Village. Forms of resistances are as follows: first they called the cotton as "project cotton" representing a symbolic resistance with negative connotation in speaking against the government project by reducing the existence of the word into "project"—no more no less. The second resistance is open-resistance in which they break the rules of planting-time, harvesting-time, and all the promises being signed before between the government and the farmers. The third resistance is by rejecting the program being incepted into their land. They openly say no to the planting of cotton in their front-back yard.

Keywords: women, cotton, resistance, ecofeminism.

Abstrak

Program Akselerasi Kapas Nasional (PAKN) yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2008 menyebabkan munculnya resistensi perempuan petani di Desa Tanamanang. Ada tiga bentuk resistensi, yaitu: 1) adalah menyebut kapas PAKN sebagai "kapas proyek" (*kamba proyek*). Sebutan ini bisa digolongkan dalam salah satu bentuk resistensi simbolik karena kata "proyek" yang melekat pada sebutan itu berkonotasi negatif. 2) Resistensi terbuka karena perilaku itu dapat diamati dan tampak dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dalam konteks pelaksanaan PAKN di Desa Tanamanang, resistensi perempuan dilakukan dengan cara melanggar aturan dalam pelaksanaan PAKN, yaitu melanggar aturan tanam dan melanggar kesepakatan dalam penjualan hasil panen kapas. 3). Resistensi asersi karena terkait dengan tuntutan petani perempuan pada pelaksanaan PAKN di desanya. Daripada bertahan menjadi kelompok tani percontohan, mereka menolak lahan mereka untuk dijadikan demonstrasi plot bagi pengembangan kapas.

Kata Kunci: perempuan, kapas, resistensi, ekofeminisme.

Pendahuluan

Kabupaten Sumba Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu dari 4 kabupaten yang terletak di bagian timur Pulau Sumba. Dengan luas wilayah 7.000,5 km² kabupaten ini memiliki 22 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 156 (BPS Kabupaten Sumba Timur, 2013). Topografi Sumba Timur yang berbukit-bukit terjal menyebabkan 43% dari total jumlah desa berada di lereng bukit dan 29% di daerah pesisir. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 72.000 orang atau 30,63% dari total penduduk (BPS Kabupaten Sumba Timur, 2013). Sejak awal abad ke-20, Waingapu sebagai ibukota kabupaten telah menjadi daerah urban yang jauh lebih dinamis daripada kota lainnya di seluruh

Pulau Sumba. Lebih dari seperempat penduduk Sumba Timur tinggal di Waingapu karena akses berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan tersedia di kota itu. Bandar udara dan pelabuhan laut yang berlokasi di Waingapu menjadikan ibu kota kabupaten Sumba Timur ini bagaikan pintu gerbang bagi masuk-keluarnya orang dan barang dari dalam dan luar Pulau Sumba.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2012 adalah 237.956 jiwa yang terdiri atas 115.471 perempuan dan 122.485 laki-laki. Dengan demikian *sex ratio* penduduk Sumba Timur adalah 106, yang artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 106 laki-laki. Dari segi kemampuan membaca dan menulis, masih terdapat 12,14% penduduk yang buta huruf, dimana penduduk perempuan yang buta

huruf lebih banyak (13,84%) daripada penduduk laki-laki (10,54%). Sementara itu jumlah penduduk yang tidak/belum pernah ke sekolah sebesar 10,07% yang terdiri dari 12,35% penduduk perempuan dan 7,88% penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang buta huruf dan tidak/belum pernah ke sekolah sangat terkait dengan isu gender dalam masyarakat Sumba. Seperti masyarakat patriarkal lainnya, masyarakat Sumba membedakan perlakuan antara anak perempuan dan laki-laki. Anak laki-laki diberi kesempatan lebih besar untuk pergi ke sekolah daripada anak perempuan. Namun selain itu, secara tradisional masyarakat Sumba membedakan kelompok masyarakat menjadi tiga; bangsawan (*maramba*), orang merdeka (*kabihu*), dan hamba (*ata*). Pengelompokan masyarakat yang bersifat hirarkis ini memang sudah semakin kabur di 3 kabupaten lainnya di Pulau Sumba, namun masih nampak cukup jelas di Sumba Timur. Dengan pengelompokan ini, maka perempuan di Sumba tidak hanya dibedakan dengan laki-laki secara gender, tetapi juga secara kelas dan generasi. Dengan demikian pada masyarakat Sumba Timur posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki; hamba lebih rendah daripada bangsawan dan orang merdeka; anak-anak, remaja dan orang muda (yang belum menikah) lebih rendah daripada orang tua. Masih terkait dengan isu gender, perempuan dan laki-laki mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Secara umum, perempuan bertugas mengurus rumah tangga, menenun (jika bisa), dan memelihara ternak kecil seperti ayam dan babi. Laki-laki berperan dalam kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan adat-istiadat. Sementara itu, pekerjaan sebagai buruh tani, mengambil air, mencari kayu bakar, dan mengembalakan ternak besar seperti kuda, kerbau, dan sapi, menjadi tugas kelompok masyarakat yang lebih rendah dalam hirarki sosial tradisional.

Sementara itu, sebesar 60,27% penduduk yang bekerja di Sumba Timur memiliki jenis pekerjaan utama sebagai tenaga usaha pertanian (BPS Kabupaten Sumba Timur, 2013). Namun tidak seperti masyarakat petani di wilayah Indonesia lainnya, masyarakat petani di Sumba Timur mempunyai karakteristik berbeda. Secara umum mereka dapat dikategorikan dalam kelompok masyarakat petani lahan kering¹ karena tinggal pada daerah dengan tipologi iklim yang *semi-arid*² (Benu, 2011). Di wilayah seperti itu curah hujan merupakan salah satu faktor kunci dalam sistem pertanian lahan kering (Campbell *et al.*, 2002 dalam Njurumana, 2008). Variabilitas

dan ketidakpastian curah hujan tahunan membuat masyarakat yang tinggal di wilayah *semi-arid* terbiasa menghadapi masa-masa sulit (Fox, 2001). Sebagai bentuk strategi bertahan hidup, pada umumnya masyarakat petani yang tinggal di daerah beriklim *semi-arid* akan memiliki pola pertanian lahan kering campuran dan aneka ragam profesi atau disebut sebagai petani polipalen, karena secara bersamaan dapat berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, petambak, dan usaha-usaha lain yang memungkinkan (Njurumana, 2008)³. Terkait dengan sistem budidaya tanaman, pola tanam mereka umumnya adalah polikultur yaitu pola pertanian dengan banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan yang tersusun dan terencana. Pola tanam seperti itu dianggap sebagai salah satu karakteristik pertanian di lahan kering karena dapat diandalkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakatnya sekaligus dapat menjaga keseimbangan alam dan lingkungan daripada pola tanam monokultur (Fox, 2001).

Ancaman Ekologis Program Akselerasi Kapas Nasional

Program Akselerasi Kapas Nasional (selanjutnya disingkat PAKN) adalah program yang dicanangkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mendorong pengembangan tanaman kapas di daerah (Balittas, 2009). PAKN dipicu oleh naiknya harga kapas dunia akibat keputusan WTO menghapus subsidi ekspor kapas dari negara maju pada tahun 2006 (Sudaryanto dan Hadi, 2009). Sebagai negara penghasil tekstil terbesar nomor 5 di dunia, kenaikan harga kapas itu berdampak signifikan pada industri tekstil nasional karena 99,5 persen serat kapas sebagai bahan baku utama pembuatan tekstil di Indonesia masih diimpor (Balittas, 2009). Bagi pengusaha tekstil nasional meningkatnya harga kapas dunia mendorong mereka untuk beralih ke kapas produksi dalam negeri (Basuki *et al.*, 2009). Sayangnya volume produksi kapas dalam negeri yang berasal dari petani kecil masih sangat rendah, yaitu hanya berkisar 1.600–2.500 ribu ton atau kurang dari 0,5 persen dari kebutuhan nasional (Balittas, 2009). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengembangan kapas nasional dengan menetapkan tanaman kapas sebagai salah satu komoditas prioritas dalam program revitalisasi perkebunan (*ibid*). Untuk mendukung penetapan itu, pemerintah menyelenggarakan lokakarya khusus tentang dampak pencabutan subsidi ekspor pada kelangsungan industri TPT (Tekstil dan Produk

Tekstil) nasional yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 2006. Tujuan lokakarya adalah menyusun strategi pengembangan kapas yang meliputi kelembagaan pengembangan kapas, dukungan teknologi, dan sumber daya yaitu; lahan, manusia, dan infrastruktur (*ibid*). Lokakarya tersebut segera diikuti dengan pelaksanaan PAKN pada tahun berikutnya.

Seiring dengan pelaksanaan PAKN pada tahun 2007, Pemerintah Pusat menyiapkan Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai “*The Cotton Belt of Indonesia*” (Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian, 2012). Dari sekian banyak pulau di wilayah propinsi itu, Pulau Sumba dipilih untuk mengawasi pelaksanaan program karena budidaya kapas dianggap mudah diterima oleh masyarakat Sumba yang mempunyai budaya menenun⁴, ketersediaan lahan yang masih luas, dan iklim yang cocok⁵. Program itu juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan di perdesaan melalui penyediaan sumber pendapatan rumah tangga alternatif⁶. Selain itu, keberadaan sebuah perusahaan perkebunan kapas komersial (PT AAI) yang beroperasi di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2006 juga dianggap sesuai untuk mendukung pelaksanaan PAKN di Pulau Sumba. Perusahaan perkebunan kapas itu diberi mandat oleh Pemerintah Pusat sebagai perusahaan penyedia benih dan pengelola produksi kapas bagi petani di wilayah Sumba⁷. Namun setelah lima tahun berjalan, implementasi program nasional tersebut di Kabupaten Sumba Timur tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Bagi pemerintah, partisipasi petani perempuan dalam mendukung inovasi dan implementasi suatu program pembangunan sangat diharapkan karena merekalah yang umumnya berperan signifikan pada sektor pertanian di perdesaan. Namun di negara-negara berbasis pertanian modernisasi teknologi dan kapitalisme global yang identik dengan kata “pembangunan” justru menjadi ancaman bagi perempuan dan lingkungan⁸ (Salman, 2007). Sebagai contoh, studi Mies (1986) dan Shiva (1989) menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan di India menghadapi berbagai kesulitan akibat pertanian komersial, perusakan hutan, dan tambang yang merubah cara hidup mereka yang tradisional karena mereka terbawa dalam berbagai bentuk eksploitasi dan ancaman kesehatan dari produksi tersebut. Akibatnya, alih-alih mendukung, perempuan justru seringkali menolak berbagai

program “pembangunan” yang dirasa mengancam penghidupan mereka dan merusak keseimbangan alam. Sayangnya, berbagai bentuk resistensi perempuan yang bertujuan memperjuangkan kehidupan dan kelestarian lingkungan seringkali “tersembunyi” dari sejarah manusia (Salman, 2007).

Kesadaran akan peran sentral dan strategis perempuan dalam pengelolaan lingkungan menjadi pendorong utama munculnya pendekatan ekofeminisme. Ekofeminisme berasal dari dua ideologi yaitu “ekologi” dan “feminisme”, yang dianggap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk “merubah” dunia yang terbebas dari berbagai bentuk dominasi (Wulan, 2007). Pendekatan ini memandang suatu masalah yang terkait dengan hubungan antara perempuan, sumber daya alam, dan kelestarian lingkungan jauh lebih dalam dan kompleks. Ekofeminisme yang muncul pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, merupakan kritik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang di bawah budaya patriarki yang dianggap berbahaya bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan alam (Shiva, 1989). Bukan hanya ideologi, ekofeminisme juga muncul dalam bentuk protes dan gerakan sosial yang menentang kerusakan alam yang berlanjut hingga menyebabkan bencana ekologi yang terjadi berulang-ulang (Wulan, 2007). Namun, seringkali perilaku perempuan yang bertujuan untuk mengkritisi ketidakadilan gender dan kerusakan lingkungan tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya – bahkan dirinya sendiri – sebagai perilaku yang “ekofeminis”.

Kajian tentang implementasi PAKN dan resistensi perempuan ini penting karena dua alasan. Pertama, introduksi dan diseminasi inovasi pada sektor pertanian masih saja mengabaikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat petani. Dalam kenyataannya peran perempuan pada sektor pertanian di perdesaan sangat signifikan. Dengan demikian, reaksi perempuan pada suatu program pengembangan produk pertanian menjadi penting untuk dipahami dalam mendukung sukses atau tidaknya program tersebut. Kedua, studi tentang resistensi perempuan dalam masyarakat petani lahan kering terhadap suatu program pembangunan di Indonesia juga masih kurang. Padahal, luas lahan kering di Indonesia mencapai 52,5 juta ha yang dibedakan menjadi lahan kering beriklim kering yang banyak terdapat di kawasan Timur Indonesia dan lahan kering beriklim basah yang banyak terdapat di kawasan Barat Indonesia (Benu, 2011).

Sementara itu, walaupun kajian tentang resistensi perempuan sudah cukup banyak dilakukan (Abu-Lughod, 1990; Kornelsen & Grzybowski, 2006, Ghosh, 2008; Anagol, 2008, Paterson, 2009), namun di Indonesia masih sangat terbatas. Dua kajian tentang resistensi perempuan pernah dilakukan di Bali oleh Sukeni (2006) dan Widiastiti (2012). Studi Sukeni (2006) mengulas tentang resistensi perempuan di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada pelaksanaan program Keluarga Berencana di Bali. Dalam kajiannya itu Sukeni (2006) menggunakan teori Gramsci, Feminisme, dan Perlawanan. Kajian lain tentang resistensi perempuan di Bali juga dilakukan oleh Widiastiti (2012). Berbeda dengan Sukeni, Widiastiti menyoroiti resistensi perempuan Bali di Desa Pasekbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada sektor industri kreatif. Kajiannya itu menggunakan perspektif *cultural studies* sebagai sudut pandang utamanya. Sementara itu, kajian tentang resistensi perempuan dengan perspektif ekofeminisme jarang ditemukan. Namun, tulisan Wulan (2007) dan Astuti (2012) sangat membantu penulis untuk lebih memahami perspektif ekofeminisme. Tulisan Wulan (2007) menyoroiti pendekatan ekofeminisme transformatif sebagai alternatif dalam mendekonstruksi relasi perempuan dan lingkungan. Dalam tulisannya itu ia secara panjang lebar mengkaji relasi antara ekologi dan feminisme, merunut akar gerakan ekofeminisme, dan mengulas berbagai tipologi ekofeminisme. Secara khusus ia menjelaskan penggunaan pendekatan ekofeminisme transformatif untuk mencapai kesetaraan jender dan kelestarian lingkungan. Studi Astuti (2012) lebih menekankan pada peran perempuan dalam menjaga lingkungan dari perspektif ekofeminisme. Tulisannya itu berisi berbagai contoh peran perempuan dalam melestarikan dan melindungi alam dan lingkungan hidup di berbagai negara dengan memahami kearifan lokal masing-masing. Dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya tulisan ini menggambarkan resistensi perempuan petani yang tinggal di lahan kering dari perspektif ekofeminisme terhadap program pengembangan tanaman kapas yang diluncurkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Sumba Timur. Tulisan ini juga merupakan hasil kajian awal (*preliminary study*) yang terkait dengan kajian tentang transformasi agraris pada masyarakat petani lahan kering di Sumba. Studi itu akan menggunakan pengalaman program pengembangan kapas dalam era otonomi daerah di Sumba sebagai studi kasus. Tulisan ini juga bersifat

eksploratif karena belum ada penelitian dengan topik yang sama dilakukan di wilayah ini.

Harga Perempuan dalam Industri Kapas

Kapas adalah serat alam yang paling penting digunakan oleh industri tekstil di seluruh dunia. Saat ini kapas alami digunakan sekitar 40 % dari produksi tekstil, sementara serat sintetis mencapai 55% (Proto *et al.*, 2000; dalam Chapagain *et al.*, 2005). Sekitar 50% produksi kapas di dunia berasal dari negara-negara di Asia, seperti China, India, dan Pakistan. Di negara-negara itu, pengembangan industri kapas menjadi strategi pembangunan yang penting untuk mengurangi angka kemiskinan di perdesaan. Sementara itu, Mancini (2006) menyinggung bahwa kapas adalah satu-satunya tanaman yang memberikan ekstra uang tunai untuk pengeluaran rumah tangga bagi jutaan petani kecil di Asia. Produksi kapas terkait erat dengan isu lingkungan karena penggunaan pestisida, pupuk sintesis, dan obat-obatan kimia yang masif pada budidayanya (Goldbach *et al.*, 2003; Mancini, 2006) Kerusakan kapas akibat hama yang mencapai 15% dari total produksi kapas dunia menyebabkan produsen kapas sangat tergantung pada penggunaan pestisida kimia. Di wilayah Asia saja, 1,5 billion dolar AS dikeluarkan setiap tahun untuk membeli produk-produk kimia. Secara umum, diperkirakan 20% dari insektisida dan 30% dari seluruh pestisida yang digunakan di Asia diaplikasikan pada perkebunan kapas. Ketergantungan itu disebut sebagai "*pesticide treadmill*" suatu istilah yang menggambarkan bahwa penggunaan pestisida yang sangat tinggi akan menghasilkan produksi yang baik untuk beberapa tahun pertama, tetapi terbukti membawa bencana pada lingkungan di kemudian hari (Jean-Christophe *et al.*, 1999).

Hal itu terjadi di Thailand dan negara-negara penghasil kapas lainnya di dunia (Barducci, 1973; Hearn, 1975; Eveleens, 1983; Matthews, 1989 dalam *ibid*). "*Pesticide treadmill*" umumnya terjadi melalui pola dan karakteristik yang terdiri dari 6 tahap, yaitu; tahap subsisten, tahap ekologi, tahap eksploitasi, tahap krisis, tahap bencana, dan tahap pengawasan terintegrasi (*ibid*). Studi-studi lain dengan topik yang sama menunjukkan bahwa pola tersebut tidak saja terjadi di Thailand, tetapi juga terjadi di banyak negara penghasil kapas lainnya (Smith, 1969; Falcon and Smith, 1973; Bottrell and Adkisson, 1977 dalam *ibid*). Konsekuensi dari penggunaan pestisida yang berlebihan menyebabkan hama menjadi kebal dan

kerusakan lingkungan (Mancini, 2006). Meningkatnya kekebalan hama dan berkurangnya populasi musuh alami hama menyebabkan rantai kehidupan alam terganggu dan beberapa binatang terancam punah. Penggunaan bahan-bahan kimia pada industri kapas juga dapat mengganggu kemampuan tanah untuk meregenerasi sendiri serta menurunkan kualitas sumber air yang berada di bawah tanah maupun yang ada di permukaan tanah (Goldbach *et al.*, 2003; Mancini, 2006). Chapagain *et al.* (2005) menyebutkan bahwa pada tahap agrikultural (produksi kapas di tingkat perkebunan) ada tiga jenis dampak yang dapat terjadi; evaporasi dari air hujan untuk pertumbuhan kapas, berkurangnya debit air tanah atau air di permukaan tanah untuk irigasi, dan polusi air akibat pupuk kimia dan pestisida. Ia dan kawan-kawannya juga memperkirakan bahwa industri kapas bertanggungjawab pada 2.6 % dari penggunaan air secara global. Satu lagi masalah lingkungan yang terkait dengan industri kapas adalah penggunaan lahan pertanian untuk perkebunan kapas. Jika pakaian seluruh penduduk di dunia ini harus terbuat dari kapas, maka tidak akan ada lagi cukup lahan untuk pertanian bahan pangan (Goldbach *et al.*, 2003).

Sementara itu, konferensi PBB tahun 2012 lalu di Rio menyepakati bahwa pembangunan yang diprioritaskan di seluruh dunia adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ini pada intinya adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (WCED, 1987). Lebih jauh lagi, pada tingkat yang minimum pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di bumi. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, Laporan KTT Dunia 2005 menjabarkan bahwa pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu ekonomi, tetapi juga isu lingkungan dan sosial. Berdasarkan uraian di atas, industri kapas yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan adalah industri kapas yang mampu mendorong tidak saja pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produksi kapas adalah dengan menerapkan pengelolaan hama yang terintegrasi (Mancini, 2006) dan pertanian organik. Pertanian organik terbukti dapat menjadi kesempatan yang baik untuk negara miskin sekaligus memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (Kilcher, 2007).

Selain masalah lingkungan, Mancini (2006) juga menyinggung bahwa industri kapas terkait dengan masalah sosial khususnya keterlibatan perempuan dan anak sebagai tenaga kerja (buruh). Industri kapas adalah salah satu industri yang padat tenaga kerja, khususnya pada saat menanam dan panen. Sementara rantai nilai kapas, termasuk industri tekstil, menyediakan lapangan kerja sebagai buruh di perusahaan bagi sebagian besar penduduk yang umumnya perempuan. Atas keterlibatan perempuan yang begitu besar pada industri kapas, Salman (2007) sampai menganalogikan bahwa industri kapas berada di atas pundak perempuan karena ribuan perempuan bekerja menjadi buruh pemetik kapas di perkebunan kapas untuk memproduksi benang dan produk akhir lainnya. Di Pakistan saja ia memperkirakan terdapat sekitar 700,000 orang buruh pemetik kapas, perempuan dan anak-anak, yang bekerja antara bulan September sampai Desember. Di India, studi Mancini (2006) juga menyinggung bahwa perempuan yang bekerja sebagai buruh tanam atau buruh petik umumnya membawa serta anak-anak mereka ketika bekerja. Namun, lingkungan kerja para buruh pemetik kapas itu berbahaya karena racun pestisida yang melekat pada tanaman kapas seringkali meracuni mereka (Goldbach *et al.*, 2003, Mancini, 2006). Bila para buruh petik itu bekerja selama 8 - 9 jam perhari, maka peluang mereka terkena residu dari pestisida sangat besar. Studi Siegmann (2006 dalam Salman, 2007) menemukan bahwa 74% perempuan buruh pemetik kapas terkena racun pestisida pada tingkat menengah, sementara sebagian lainnya mencapai tingkat keracunan yang termasuk berbahaya. Selanjutnya, Mancini (2006) menyebutkan bahwa anak-anak yang dibawa ibunya bekerja di perkebunan kapas juga mengalami masalah gangguan kesehatan dan mental akibat residu pestisida. Uraian di atas menunjukkan bahwa industri kapas di seluruh dunia mempunyai keterkaitan yang erat dengan perempuan. Walau diakui dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, namun perempuan dan anak-anak yang bekerja di perkebunan kapas atau

memproduksi kapas mempunyai peluang yang besar untuk teracuni residu pestisida yang digunakan dalam budidaya kapas komersial.

Perempuan Melawan

Adanya bentuk resistensi atau perlawanan yang muncul dalam hubungan sosial sehari-hari adalah salah satu isu yang relatif baru (Gosh, 2008). Studi yang dilakukan James Scott (1981;1985;1993) di Asia Tenggara (Burma, Vietnam, dan Malaysia) pada tahun 1970-an menjadi titik awal studi yang menyoroti bentuk resistensi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat petani. Bagi Kerkvliet (2009) penolakan atau resistensi mengacu pada apa saja yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang menunjukkan rasa marah, tidak suka, penolakan atau perlawanan, terhadap apa saja yang dianggap sebagai tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang mereka anut oleh orang (orang) yang mempunyai posisi lebih tinggi dan berkuasa, baik kelompok atau lembaga. Melalui resistensi, orang atau masyarakat yang tersubordinasi berjuang untuk menegaskan klaim mereka pada apa yang mereka percayai sebagai hak berdasarkan nilai-nilai dan hak yang diakui oleh sebagian besar orang lain yang sama dengan mereka. Berdasarkan studi-studi yang dilakukan Scott dan pengikutnya, Kerkvliet kemudian mengembangkan konsep resistensi petani dalam kehidupan sehari-hari ala Scott itu menjadi konsep yang disebutnya sebagai politik sehari-hari petani (*everyday politics of the peasant*). Berbeda dengan pengertian politik secara umum, politik sehari-hari yang dimaksud oleh Kerkvliet (2009) adalah perilaku petani yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang umum dan bukan sesuatu yang "berbahaya". Namun, perilaku itu sebenarnya dimaksudkan untuk menghindari atau bahkan menolak sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan mereka.

Sayang teori tentang resistensi yang dipopulerkan oleh Scott dan Kerkvliet itu tidak mempertimbangkan relasi gender yang terkait dengan struktur kekuasaan, dan gagal untuk mengenali adanya heterogenitas pada kelompok masyarakat yang disebut sebagai perempuan (Ghosh, 2008). Walaupun nampak serupa, dalam kenyataannya ada perbedaan di antara perempuan yang disebabkan oleh perbedaan kelas, kasta, ras dan etnisitas (Argawal, 1992 dalam Rao, 2012). Oleh sebab itu perempuan tidak dapat dianggap sebagai satu kelompok yang homogen atau dimasukkan dalam satu kategori saja, atau dianggap sama dalam satu

negara, atau bahkan seluruh dunia (Argawal, 1992 dalam Gaard, 2011). Atas dasar heterogenitas itulah Haynes dan Prakash (1992) mendefinisikan resistensi sebagai perilaku dan praktek budaya oleh kelompok yang tersubordinasi untuk melawan formasi hegemoni sosial. Definisi ini dianggap layak untuk mengakomodir resistensi yang dilakukan perempuan dalam berbagai keragamannya. Berdasarkan definisi tersebut, Anagol (2008) mengembangkan definisi resistensi perempuan melalui studinya di India pada perempuan di masa penjajahan Maharashtra. Menurutnya, resistensi perempuan adalah tindakan secara sadar yang ditandai oleh rencana yang muncul dalam kondisi ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yang seringkali berasal dari ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Anagol, 2008). Dari sudut pandang *cultural studies*, Holid (2010, dalam Widiastiti, 2012) menganggap resistensi sebagai fenomena subkultur yang mempunyai ciri, sifat, bentuk dan manifestasi beragam.

Sementara itu, dalam kondisi terdominasi oleh laki-laki bentuk resistensi atau perlawanan perempuan akan sangat berbeda dari laki-laki (Gosh, 2008). Untuk itu secara umum Anagol (2008) membedakan tiga bentuk resistensi perempuan; resistensi simbolik (*symbolic resistance*), resistensi asersi (*assertion resistance*), dan resistensi terbuka (*open resistance*). Berdasarkan studinya di India, Anagol menganggap resistensi simbolik adalah bentuk-bentuk perlawanan perempuan yang dilakukan secara simbolik, seperti misalnya melalui tulisan, puisi, lagu, atau tarian. Ia menunjukkan bahwa pada masa penjajahan Maharashtra perempuan India menggunakan berbagai bentuk literatur untuk memprotes ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada masa itu. Selanjutnya, resistensi dalam bentuk yang lebih tegas (asersi) dilakukan perempuan melalui perilaku-perilaku yang secara nyata ingin menunjukkan eksistensi dirinya tetapi tidak frontal. Termasuk dalam kategori ini adalah tuntutan perempuan pada apa yang dianggapnya sebagai hak mereka melalui pengadilan. Dalam konteks masyarakat India pada masa penjajahan Maharashtra seorang janda dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya karena sistem hukum pada masa itu memberikan peluang. Adapun resistensi terbuka umumnya dilakukan perempuan bila kedua bentuk resistensi sebelumnya gagal memenuhi harapannya. Bentuk resistensi terbuka adalah melakukan hal-hal yang ekstrim

seperti berdemonstrasi, melawan secara frontal, bahkan sampai menghabisi nyawa orang lain. Dalam tulisannya, Anagol (2008) mengungkapkan cerita tentang seorang istri yang membunuh suaminya sebagai bentuk protes atas relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Senada dengan Anagol, Holid (2010, dalam Widiastiti, 2012) juga menyinggung bahwa resistensi dapat dilakukan secara terang-terangan untuk melawan bahkan merusak struktur sosial utama, tetapi juga dapat dilakukan secara terus-menerus melalui gesekan dalam masyarakat, negosiasi, atau bahkan melalui kompromi dan adaptasi.

Selain ketiga bentuk resistensi perempuan, Anagol (2008) mengingatkan bahwa resistensi perempuan dilakukan dalam berbagai bentuk karena beragam latar belakang perempuan itu sendiri yang terkait dengan budaya, adat-istiadat, pendidikan, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Namun berbagai bentuk resistensi perempuan yang dilakukan secara sadar itu bertujuan sama; merubah keadaan, baik bagi dirinya sendiri atau masyarakatnya. Di Indonesia, hasil studi Sukeni (2006) menunjukkan bahwa resistensi perempuan Bali dalam program KB didorong oleh faktor tradisi, kepercayaan dan ekonomi. Resistensi itu dilakukan dengan cara tidak mau menggunakan alat kontrasepsi dan memilih menggunakan alat kontrasepsi dengan sistem kalender. Sementara hasil studi Widiastiti (2012) menunjukkan bahwa perlawanan perempuan Bali dilakukan untuk mendobrak idealisme budaya patriarki, khususnya pada bidang industri kreatif. Resistensi perempuan di Desa Pasekballi bukan dilakukan secara frontal tetapi berupa tindakan masif tanpa berupaya menghancurkan salah satu pihak. Adapun faktor pendorong resistensi perempuan di Desa Pasekballi itu adalah ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dampak dari resistensi adalah peningkatan ekonomi rumah tangga, dampak psikologi, dan kesetaraan gender.

Dengan menggunakan perspektif ekofeminisme, berbagai bentuk resistensi perempuan tersebut di atas dipandang sebagai reaksi mereka terhadap ketidakadilan dalam relasi gender sekaligus kerusakan alam dan lingkungan hidup. Reaksi mereka itu seringkali diabaikan sebagai bentuk perjuangan perempuan dalam keseharian mereka atas relasi sosial yang sebenarnya secara terus-menerus terkait dengan ketimpangan relasi kekuasaan. Adapun Salman (2007) menyebut beberapa contoh gerakan ekofeminisme yang dilakukan perempuan di berbagai negara seperti; Gerakan "love Canal" di

Amerika Serikat, gerakan *Chipko* di India, gerakan "greenbelt" di Kenya, dan gerakan menanam pohon di Bangladesh dan Pakistan. Gerakan "love canal" baru disadari oleh pemerintah AS sebagai bentuk resistensi perempuan terhadap polusi sungai yang ditimbulkan sektor industri ketika sekelompok perempuan melakukan perlawanan terbuka dengan cara membakar, melakukan demonstrasi sehingga membuat beberapa diantaranya masuk penjara (Seager, 1993 dalam Salman, 2007). Berbeda dengan di AS, gerakan *Chipko*⁹ di India adalah suatu gerakan spontanitas yang dilakukan perempuan untuk melindungi pohon dengan cara memeluk pohon yang akan ditebang. Gerakan "green belt" di Kenya adalah gerakan menanam pohon yang diawali pada tahun 1977. Namun Salman (2007) juga mengingatkan bahwa tidak semua gerakan di atas dapat membawa perubahan seperti yang diharapkan. Gerakan "love canal" dan "greenbelt" memang sukses dipimpin oleh perempuan yang mulai berkampanye pada tingkat akar rumput sampai kampanye besar-besaran di tingkat internasional. Efek domino yang dihasilkan tetap berlanjut dan terus menjadi inspirasi masyarakat yang lebih luas. Namun gerakan *Chipko* yang mendapat perhatian luar biasa ada saat hal itu terjadi, seakan-akan meredup setelahnya. Sementara kasus Bangladesh dan Pakistan unik karena usaha untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat luas terhadap masalah perempuan dan lingkungan, misalnya dalam menjaga hutan dan kebun kapas, kebanyakan justru didukung oleh lembaga donor dan bukan usaha murni dari perempuan lokal yang menginginkan perubahan. Atas fenomena ini, nampaknya penting untuk membedakan peran para ekofeminis profesional (*professional ecofeminists*) yang berasal dari kalangan akademik dan seringkali merangkap sebagai aktivis, dengan para ekofeminis alami (*natural ecofeminists*) sebagai pelaku-pelaku unggul yang berasal dari akar rumput tetapi inspiratif dalam menyelamatkan ekologi dengan gagasan yang seringkali sangat sederhana (Andalas, 2013)

Narasi Perempuan dari Desa Tanamanang

Bagi masyarakat Sumba, kapas (*Gossypium, sp*) atau *kamba* dalam bahasa lokal, bukanlah tanaman asing. Walau belum ditemukan dokumen resmi tentang sejarah tanaman kapas di Sumba, namun dari laporan *Opperhoofd*¹⁰ yang ditempatkan di Sumba pada tahun 1750-1800 tercatat bahwa selain cendana, hamba, dan kuda, terdapat pula tanaman kapas di Pulau Sumba (Wielenga, 1916 dalam Wellem,

2004). Dalam laporannya tentang Sumba Wielenga, seorang misionaris asal Belanda, juga menyinggung keberadaan kapas di Sumba meskipun ia sendiri tidak pernah menemukan adanya perkebunan kapas rakyat¹¹. Tanaman kapas biasanya tumbuh di sekitar halaman kampung (*paraingu*). Meskipun sengaja ditanam nenek-moyang, tanaman itu dibiarkan tumbuh tanpa perawatan khusus. Pada jaman dahulu perempuan Sumba yang mempunyai keahlian menenun menggunakan serat kapas untuk dijadikan benang sebagai bahan baku utama kain (tenun ikat). Namun sejak munculnya benang sintesis buatan pabrik pada sekitar tahun 1980-an, para penenun kain di Sumba jarang memintal benang dari serat kapas. Sejak itu pula tanaman kapas di Sumba menjadi kurang penting bagi kehidupan ekonomi rumah tangga masyarakatnya.

Pada tahun 2008, PAKN dimulai di tiga kabupaten di Pulau Sumba; Sumba Timur, dan Sumba Tengah Sumba Barat (Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian, 2012). Dua tahun kemudian, pada Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Pusat memperluas wilayah pengembangan kapas sampai ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian pada tahun 2010 program pengembangan kapas itu sudah mencakup seluruh kabupaten di Pulau Sumba. Adapun lahan kapas di seluruh Pulau Sumba direncanakan mencapai 3.500 hektar pada tahun 2011, yang terdiri dari 1000 hektar di Sumba Timur, 500 hektar di Sumba Tengah, 500 hektar di Sumba Barat, dan 1500 hektar di Sumba Barat Daya (Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian, 2012). Pada tahun 2012, di Sumba Timur saja, luas areal budidaya kapas yang dimiliki petani mencapai 2.250 hektar, dengan total anggaran pengembangan kapas yang didanai APBN senilai 800 juta rupiah pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 1,250 milyar rupiah pada tahun 2012¹². Bupati Sumba Timur dalam acara panen perdana kapas tahun 2009 yang dihadiri Anton Apriyanto, menteri pertanian saat itu, menyatakan sebegini besar kecamatan di Sumba Timur berpotensi untuk pengembangan tanaman kapas¹³.

Dinas Perkebunan Sumba Timur menentukan Desa Tanamanang sebagai lokasi demonstrasi plot (demplot) untuk pengembangan kapas di Sumba Timur pada Tahun 2008. Lokasi demplot kapas terletak di DAS Kalionga (*mondu* Kalionga) yang luasnya kurang lebih 20 ha. Dua kelompok tani yang tinggal persis di sekitar DAS diberi mandat untuk membudidayakan benih kapas untuk mendukung

PAKN¹⁴. Sebagai kelompok tani di lokasi demplot, anggota kelompok tani yang mendapat benih kapas menerima bantuan dari pemerintah berupa sarana dan prasarana produksi (saprodi) kapas secara penuh. Pemerintah bahkan memberikan bantuan 2 unit pompa air dan sejumlah uang untuk pembelian solar dan upah membersihkan kebun. Adapun luas lahan yang ditanami kapas berbeda-beda sesuai dengan lahan yang dimiliki petani atau yang sanggup dikerjakan petani. Namun secara umum dapat dikatakan luas lahan yang ditanami kapas oleh petani berkisar antara 0,5-1 ha. Sebelum ditanami kapas, *mondu* itu ditanami berbagai bahan makanan seperti jagung, ubi kayu, ubi manis (*petatas*), labu, tomat, sawi, dan kacang panjang dengan pola tanam tradisional yang polikultur. Pada akhir tahun 2008, banjir melanda DAS Kalionga dan sekitarnya. Kebun kapas kedua kelompok tani itu pun rusak dan produksi kapas tidak sesuai harapan. Pada tahun 2009, kedua kelompok tani itu kembali diberi tugas untuk membudidayakan kapas di lahan *mondu* mereka. Sayang serangan hama yang begitu gencar membuat panen kapas kembali gagal memenuhi target pemerintah.

Penetapan demonstrasi plot bagi pengembangan kapas di *mondu* Kalionga membawa perubahan pada pola tanam masyarakat lokal. Sebelumnya, petani di kedua kelompok tani itu bebas menanam apa saja, dengan cara apa saja, dan digunakan untuk apa saja di *mondu* dan lahan mereka. Namun sejak mendapat "tugas" sebagai kebun demplot, petani harus menyediakan lahan untuk ditanami kapas sehingga mengurangi jumlah tanaman bahan pangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kapas harus ditanam dengan aturan tertentu yang diajarkan penyuluh dari dinas perkebunan. Sebagian petani menanam benih kapas dan benih jagung secara tumpang sari dengan aturan; 2 larik (baris) jagung dan 3 larik (baris) kapas. Menurut penyuluh dari Dinas Perkebunan, hal itu dilakukan untuk menghindari serangan hama pada tanaman kapas. Ada pula petani yang menanam seluruh lahannya dengan kapas (monokultur). Bila hal ini yang dipilih petani, maka mereka dilarang untuk menanam sayur-sayuran lain karena hamanya dapat mengancam tanaman kapas. Namun petani mendapati bahwa kapas sangat mudah terserang hama. Hampir setiap minggu petani harus menyemprot "obat hama"¹⁵ dari pemerintah. Bila "obat hama" itu habis, mereka harus membelinya sendiri ke Waingapu, ibukota kabupaten. Sekaleng

“obat hama” harganya mencapai Rp. 75.000,- yang habis digunakan selama satu bulan. Setelah kapas selesai dipanen, tanaman itu harus dibabat habis dan dibakar. Pemerintah akan menyediakan benih kapas baru pada tahun berikutnya. Dapat dikatakan, petani cenderung tergantung pada perusahaan dan pemerintah dalam hal penyediaan benih kapas dan sarana-prasarana produksi kapas lainnya. Lebih jauh lagi, produksi kapas yang dihasilkan petani digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tekstil nasional, khususnya oleh PT AAI. Oleh sebab itu petani harus menjual hasil produksi kapasnya kepada perusahaan dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Pada tahun 2008 kapas petani dibeli perusahaan dengan harga Rp. 2.000,-/kg. Dengan demikian ketergantungan petani pada perusahaan bukan hanya pada masalah penyediaan benih dan sarana-prasarana produksi lainnya saja, tetapi juga pada masalah harga jual dan pembeli atau pasar bagi produksi kapas mereka.

Seorang informan bercerita ketika lahannya ditanami kapas, ia tidak dapat lagi menanam ubi, jagung atau sayur-sayuran. Lahan mereka itu seluruhnya ditanami kapas sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Mereka tidak diperbolehkan menanam tanaman lain karena akan mengganggu produksi kapas. Akibatnya, ia harus membeli sayur yang selama ini bisa didapat dari kebun di pasar. Sementara itu pasar tradisional (*pranggang*) hanya tersedia seminggu sekali dan letaknya cukup jauh dari kampungnya. Ia harus membayar sejumlah uang untuk biaya transportasi sekaligus mengeluarkan uang untuk berbelanja. Selain itu, ia juga merasa lahan yang seluruhnya ditanami kapas membuat kesempatan untuk mendapat tambahan pendapatan rumah tangganya menjadi hilang. Ketika masih menanam sayur-mayur dan ubi di lahannya, ia dapat menjual sedikit dari hasil kebun itu ketika membutuhkan uang tunai. Pada hari pasar yang jatuh setiap Hari Sabtu, hasil kebun ia bawa ke *pranggang* untuk dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti sabun, gula, kopi, dan minyak tanah. Ketika lahan mereka ditanami kapas, ia tidak bisa lagi menjual hasil kebun. Ia harus sabar menunggu selama 4-5 bulan sebelum kapas bisa dipetik dan dikumpulkan cukup banyak sebelum dijual. Jika petugas dari pemerintah atau perusahaan kapas datang tepat waktu, maka mereka bisa segera mendapat uang. Namun seringkali petugas dari pemerintah atau perusahaan datang

tidak menentu dan mereka harus menunggu cukup lama sebelum bisa menjualnya. Hal ini diperparah lagi karena uang hasil penjualan kapas langsung diterima suaminya, sehingga seringkali habis bukan untuk keperluan rumah tangga.

Kapas yang jauh lebih ringan daripada jagung selalu menjadi keluhan utama dalam pembicaraan tentang PAKN. Bagi perempuan, untuk menghasilkan 1 kg saja, kapas harus dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada 1 kg jagung. Para informan menggambarkan hal ini dengan cara membandingkan hasil panen jagung dan kapas yang disimpan dalam karung ukuran 50 kg. Satu karung ukuran 50 kg akan dapat menampung 45-50 kg jagung, sementara untuk menyimpan kapas hanya bisa diisi paling banyak 30 kg kapas. Itu pun para informan mengaku harus bekerja keras memukul-mukul hasil panen kapas dengan alu supaya padat dan dapat lebih banyak masuk dalam karung. Bagi informan, hal yang lebih penting lagi adalah mereka bisa menyimpan hasil panen jagung untuk persediaan bahan pangan rumah tangga dan menjualnya pada siapa saja yang dapat membeli dengan harga paling tinggi. Dengan hasil panen kapas, mereka tidak dapat memakannya dan harus menjual kepada pihak tertentu dengan harga yang sudah ditentukan. Atas pengalaman ini para informan merasa mengerjakan lahan seluas 1 ha untuk ‘kerja jagung’ jauh lebih menguntungkan daripada ‘kerja kapas’ dengan luas lahan yang sama.

Lebih jauh lagi, semua informan merasakan gatal-gatal saat memetik kapas karena banyak hama pada tanaman kapas. Padahal mereka mengaku sudah melakukan semua yang diperintahkan para penyuluh dari dinas perkebunan. Agar tidak gatal, kapas harus disemprot “obat hama” sebelum dipetik. Namun “obat hama” yang disediakan oleh pemerintah sebagai bantuan tidak akan cukup kalau digunakan terus-menerus. Akhirnya seringkali mereka enggan memetik kapas dan membiarkannya saja. Pada masa panen kapas, setiap hari para informan harus segera memasukkan kapas di karung dan menyimpannya dengan baik agar tidak terkena air. Mereka juga menjauhkannya dari api karena kapas cepat terbakar. Rumah mereka yang umumnya terbuat dari kayu membuat mereka khawatir bila kapas sampai terbakar, maka hal itu akan mencelakakan keluarga mereka.

Atas berbagai pengalaman yang terjadi, petani perempuan di kedua kelompok tani tersebut merasa terbebani dengan PAKN yang dilakukan

di lahan mereka. Namun posisi mereka dalam struktur masyarakat patriarkhal membuat mereka sulit mengemukakan pendapat, khususnya pada forum resmi yang dihadiri oleh laki-laki, petugas pemerintah, atau penyuluh lapangan. Para petani perempuan ini pun hanya berani melakukan apa yang disebut Kerkvliet (2009) sebagai "perlawanan sehari-hari" untuk menunjukkan penolakan mereka pada tugas menjadi kelompok tani yang mengelola demplot. Adapun resistensi yang dilakukan petani perempuan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama menyebut kapas bantuan pemerintah tersebut dengan istilah "kapas proyek" atau "kamba proyek". Adapun masyarakat Desa Tanamanang membedakan kapas (*kamba*) menjadi beberapa jenis yaitu; *kamba humba* (kapas sumba) untuk menyebut jenis kapas lokal yang diyakini masyarakat Sumba dibawa oleh nenek moyang mereka; *kamba ranga* yang tumbuh liar di hutan; *kamba jawa*¹⁶ (kapas jawa) untuk jenis kapas yang dibagikan pemerintah pada sekitar tahun 1980-an¹⁷, dan *kamba hika* untuk jenis pohon kapok (randu) yang digunakan untuk membuat bantal, guling, dan kasur. Sedangkan kapas hibrida dan kanesia 8 yang dibudidayakan masyarakat dalam PAKN disebut sebagai "kapas proyek" atau "kamba proyek". Istilah itu selain menunjukkan bahwa kapas ini berbeda dari jenis kapas yang sudah ada dalam masyarakat, juga sebenarnya mempunyai konotasi negatif karena kata "proyek" selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan hanya untuk menghambur-hamburkan uang, atau untuk keuntungan sebagian orang, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bentuk resistensi sehari-hari berikutnya adalah dengan menanam benih kapas tidak sesuai aturan. Pengalaman membudidayakan kapas pada Tahun 2008 yang mengecewakan membuat para informan melakukan bentuk perlawanan ini pada musim tanam Tahun 2009. Benih kapas yang seharusnya ditanam bersamaan dengan benih jagung dengan aturan tertentu (2 baris jagung diselingi 3 baris kapas) tidak dilakukan sesuai aturan. Kesempatan untuk melakukan hal itu semakin terbuka lebar ketika ternyata benih kapas PAKN pada tahun tersebut terlambat mereka terima. Petani segera memenuhi lahan mereka dengan jagung dan hampir tidak menyisakan ruang untuk ditanami kapas. Ketika akhirnya benih kapas mereka terima, benih itu hanya ditanam disela-sela tanaman jagung atau bahkan ditanam di pinggir-pinggir kebun. Akibatnya, produksi kapas mereka jauh dibawah target

pemerintah. Terkait dengan resistensi tersebut di atas, ketika kedua kelompok tani di Desa Tanamanang itu ditetapkan menjadi lokasi demplot, petugas dari dinas perkebunan dan perusahaan datang untuk melakukan "sosialisasi" dan "diseminasi" kegiatan. Salah satu "janji" mereka adalah akan datang sendiri untuk mengambil hasil panen kapas dari petani. Pada saat kapas sudah dipanen, petani dapat menyampaikannya pada penyuluh atau petugas dari dinas perkebunan yang akan menghubungi petugas dari perusahaan kapas. Petugas dari perusahaan kapas akan datang dan mengambil hasil panen kapas dari petani dengan menimbanginya secara langsung dihadapan petani. Pembayaran akan segera dilakukan setelah hasil panen kapas itu selesai ditimbang. Namun pengalaman informan pada hasil panen kapas yang ditanam tahun 2008 menunjukkan bahwa petugas dari perusahaan kapas tidak menentu datangnya. Kapas yang sudah selesai dipanen sudah bertumpuk namun hingga berbulan-bulan belum ada petugas yang datang mengambil dan membeli. Ketika akhirnya petugas dari perusahaan kapas datang, uang pembelian kapas pun tidak langsung dibayarkan. Hasil panen kapas yang sudah ditimbang oleh petani di rumahnya dibawa ke lokasi perusahaan dan ditimbang kembali. Pembayaran kapas baru dilakukan di lokasi perusahaan kapas setelah kapas ditimbang ulang oleh pihak perusahaan. Salah seorang informan pernah mengalami kekecewaan karena hasil panen kapas yang sudah ditimbanginya sendiri ternyata lebih sedikit dari hasil timbangan perusahaan. Akibatnya, uang yang diterimanya sebagai pembayaran atas penjualan kapas tidak sesuai dengan yang dibayangkannya. Atas kejadian ini, ia memilih untuk melanggar aturan budidaya kapas pada tahun berikutnya sehingga panen kapas tidak sesuai target. Ia bahkan menggunakan kapas hasil panen pada tahun itu untuk mengganti kapuk yang sudah usang dalam kasur dan bantal di rumahnya.

Kekecewaan yang dialami pada tahun 2008 dan 2009 menyebabkan petani perempuan di kedua kelompok tani memberanikan diri untuk menolak PAKN secara lebih tegas. Mereka bersepakat untuk tidak mau lagi menggunakan lahan *mondu* mereka sebagai lokasi demplot pengembangan kapas pada tahun anggaran berikutnya. Keputusan ini dapat dikatakan sebagai bentuk resistensi ketiga atas apa yang telah mereka alami. Namun alih-alih menjelaskan berbagai pengalaman pahit dan kekecewaan mereka akibat penggunaan lahan sebagai demplot kapas, petani perempuan memilih kekhawatiran pada

bencana banjir yang melanda lahan *mondu* sebagai alasan utama penolakan mereka. Alasan itu memang masuk akal mengingat sejak tahun 2008 lahan mereka yang berada tepat di daerah aliran sungai (DAS) hampir setiap tahun mengalami bencana banjir. Penolakan itu kemudian didukung anggota kelompok tani lainnya sehingga Dinas Perkebunan Sumba Timur pun tidak memperpanjang *mondu* Kalionga sebagai lokasi demplot pengembangan kapas. Dinas Perkebunan kemudian menyewa lahan lain seluas 3 ha untuk menjadi lokasi demplot pengembangan kapas. Tiga orang petugas penyuluh kapas dari Dinas Perkebunan mengelola demplot baru yang lokasinya tidak jauh dari lokasi demplot lama. Pada Bulan Mei 2013, banjir bandang kembali melanda DAS Kalionga dan merusak kebun jagung petani di Desa Tanamanang, termasuk demplot baru tersebut. Hingga akhir Bulan Juli 2013 kebun demplot pengembangan kapas itu masih tampak terbengkalai.

Berbagai bentuk resistensi perempuan di Desa Tanamanang tersebut di atas menunjukkan respon mereka pada ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat. Ketidakadilan gender yang dimaksud adalah pelaksanaan PAKN menutup akses perempuan pada tambahan pendapatan rumah tangga yang berasal dari hasil kebun. Ketika petani perempuan tidak dapat lagi menjual hasil kebun mereka menjadi sangat tergantung pada pendapatan yang dihasilkan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lebih jauh lagi, uang yang diperoleh dari hasil panen kapas juga tidak dapat langsung mereka nikmati karena diterima oleh suami mereka. Alih-alih menjadi sumber pendapatan alternatif, perempuan di Desa Tanamanang justru merasa PAKN menyebabkan mereka tidak dapat lagi memegang uang tunai. Selain respon pada ketidakadilan gender, resistensi perempuan di Desa Tanamanang juga menunjukkan reaksi mereka pada keberlanjutan keseimbangan alam. Pola tanam monokultur, seperti pada pelaksanaan PAKN, sudah dikenali sebagai salah satu penyebab rusaknya keseimbangan alam. Walaupun pola tanam ini dapat meningkatkan hasil pertanian, namun penanaman monokultur menyebabkan terbentuknya lingkungan pertanian yang rentan terhadap hama. Pola tanam monokultur membutuhkan lebih banyak pupuk kimia, insektisida, dan pestisida karena tanaman lebih mudah terserang hama dan penyakit. Jika tanaman pertanian terserang hama, maka dalam waktu cepat hama itu akan menyerang wilayah yang lebih luas. Akibatnya petani terancam gagal

panen karena tanamannya rusak. Sebaliknya, pola tanam tradisional yang sudah dikenal masyarakat di Desa Tanamanang yang polikultur akan menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan pertanian mereka.

Penutup

PAKN yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2008 menyebabkan munculnya resistensi perempuan petani di Desa Tanamanang. Namun jauh daripada perilaku yang berbahaya dan destruktif, resistensi atau perlawanan perempuan di Desa Tanamanang hampir tidak nampak karena melebur dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari sebagai petani. Adapun bentuk resistensi perempuan di Desa Tanamanang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Bentuk pertama adalah menyebut kapas PAKN sebagai “kapas proyek” (*kamba proyek*). Sebutan ini bisa digolongkan dalam salah satu bentuk resistensi simbolik karena kata “proyek” yang melekat pada sebutan itu berkonotasi negatif. Resistensi bentuk kedua dapat disebut sebagai bentuk resistensi terbuka karena perilaku itu dapat diamati dan tampak dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dalam konteks pelaksanaan PAKN di Desa Tanamanang, resistensi perempuan dilakukan dengan cara melanggar aturan dalam pelaksanaan PAKN, yaitu melanggar aturan tanam dan melanggar kesepakatan dalam penjualan hasil panen kapas. Dengan demikian, resistensi terbuka dalam studi ini berbeda dengan definisi resistensi terbuka Anagol (2008) yang lebih menekankan pada bentuk-bentuk perlawanan perempuan yang destruktif dan membahayakan orang lain. Bentuk resistensi ketiga dapat disebut sebagai resistensi asersi karena terkait dengan tuntutan petani perempuan pada pelaksanaan PAKN di desanya. Daripada bertahan menjadi kelompok tani percontohan, mereka menolak lahan mereka untuk dijadikan demonstrasi plot bagi pengembangan kapas.

Tuntutan tegas itu memang tidak sampai ke meja hijau, namun bentuk resistensi itu secara jelas menunjukkan bagaimana peran petani perempuan di Desa Tanamanang. Dalam kenyataannya ketiga bentuk resistensi tersebut di atas terjadi secara simultan, walau dapat dibedakan. Oleh sebab itu, tidak ada satu bentuk resistensi yang lebih menonjol daripada lainnya karena yang lebih ditekankan dalam studi ini adalah “kesehari-harian” petani perempuan dalam menanggapi berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan menggunakan perspektif

ekofeminisme, berbagai bentuk resistensi perempuan di Desa Tanamanang memang merupakan respon dari ketidakadilan gender dan ekologis, karena menutup akses perempuan pada peluang menambah pendapatan rumah tangga, dan usaha untuk menjaga keseimbangan alam, dengan menolak pola tanam monokultur dan memilih pola tanam tradisional (polikultur) yang dapat menjamin pertanian yang berkelanjutan. Namun tidak hanya itu, studi ini juga menunjukkan bagaimana para ekofeminis alami yang berasal dari masyarakat petani dalam realitas kesehariannya berjuang untuk menegosiasikan hubungan sosial yang selalu terkait dengan relasi kekuasaan antara yang mendominasi dan yang terdominasi.

Daftar Pustaka

- Abu-Lughod, Lila, 1990. "The Romance of Resistance: Tracing Transformation of Power Through Bedouin Women". *American Ethnologist*. Vol. 17, Issue 1, pp 41 - 55
- Anagol, Padma, 2008. "From the Symbolic to the Open : Women's Resistance in Colonial Maharashtra". *Behind the Veil: Resistance, Women, and the Everyday in Colonial South Asia*. Palgrave MacMillan
- Andalas, Patrisius Mutiara, SJ, 2013. "Perempuan Melawan *Ecocide* (Pembantaian Massal Ekologi): Tafsir Ekofeminis Kristiani". *Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya*. Seri I Kajian Ekofeminisme. Yogyakarta. Jalasutra
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, 2012. "Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan." *Indonesian Journal of Conservation*, Vol.1, No.1, hal. 49 – 60
- Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas): <http://balittas.litbang.deptan.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, 2013. Sumba Timur dalam Angka 2013 *online*. BPS Kabupaten Sumba Timur : <http://sumbatimurkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur, 2013. Statistik Daerah Kabupaten Sumba Timur 2013 *online*. BPS Kabupaten Sumba Timur <http://sumbatimurkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi>
- Basuki, T.; Sahid, M., & Wanita, Y.P., 2007. "Pengembangan Kapas Di Indonesia dan Permasalahannya" dalam *Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. p.142-146.
- Benu, Fred L., 2011. "Mengapa harus disebut pertanian lahan kering, padahal aktivitas budidaya selalu bersentuhan dengan ketersediaan air?" *Dialektika Pertanian Lahan Kering*. Diakses dari: <http://drylandagriculture.blogspot.com>
- Castella, Jean-Christophe; Damien Jourdain; Guy Trebuil; Banpot Napompeth, 1999. "A systems approach to understanding obstacles to effective implementation of IPM in Thailand: key issues for the cotton industry". *Agriculture, Ecosystems and Environment* No. 72, pp 17-34
- Chapagain, A.K; A.Y. Hoekstra; H.H.G. Savenije; R. Gautam, 2005. "The water footprint of cotton consumption". *Value of Water Research Report Series No. 18*. UNESCO-IHE Delft
- Dialektika Pertanian Lahan Kering: <http://drylandagriculture.blogspot.com>
- Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian, 2012. Kebijakan Pengembangan *Cotton Belt* di Nusa Tenggara Timur. Balittas doc.
- Flores News : <http://www.floresnews.com>
- Fox, James J., 2001. "Sejarah Sosial dan Kebijakan Pemerintah atas Pembangunan Pertanian di Indonesia Timur". *Pembangunan Pertanian Di Wilayah Kering Indonesia. Prosiding Konferensi Internasional Pembangunan Pertanian Semi Arid Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Maluku Tenggara*. Tanggal 10 – 16 Desember 1995 di Kupang.
- Gaard, Greta, 2011. "Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism". *Feminist Formations*, Vol. 23 No. 2 (Summer) pp. 26–53
- Ghosh, Anindita, 2008. *Behind the Veil: Resistance, Women, and the Everyday in Colonial South Asia*. Palgrave MacMillan.
- Gladwell, M. 2008. *Outliers: The Story of Success*. Penguin Books.
- Goldbach, Maria; Stefan Seuring; Simone Back, 2003. "Coordinating Sustainable Cotton Chain for the Mass Market : The Case of the German Mail-Order Business OTTO". *GMI* 43, Autumn 2003
- Haynes, Douglas & Gyan Prakash (eds), 1992. *Contesting Power: Resistance and Everyday Social Relations in South Asia*. Berkeley and LA: University of California Press.
- Kerkvliet, Benedict J.Tria, 2009. "Everyday politics in peasant societies (and ours)". *Journal of Peasant Studies*. Vol. 36, No. 1, pp 227 – 243.
- Kilcher, Lukas, 2007. "How organic agriculture contributes to sustainable development". University of Kassel at Witzenhausen. *JARTS*, Supplement 89, pp 31 – 49.
- Kornelsen, Jude & Stefan Grzybowski, 2006. "The Reality of Resistance: The Experiences of Rural Parturient Women". *Journal of Midwifery and Women's Health*. Vol. 51, Issue 4, pp. 260 – 265
- Mancini, Francesca, 2006. "Impacts of Farmer Field Schools on Cotton Growers in Asia". A paper presented for the *ICAC Plenary Meeting*, 11 – 15 September 2006.
- Mies, Maria, 1986. *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*. London. Zed Press
- Mudita, I.Wayan, 2010. "Apa sebenarnya arti kata "kering" dalam pertanian lahan kering dan bagaimana kaitannya dengan bencana kekeringan?" *Dialektika Pertanian Lahan Kering*. Diakses dari: <http://drylandagriculture.blogspot.com>
- Njurumana, Gerson N.D., 2008. Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Agrosylvopastur di Timor dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. *Info Hutan*, Vol. V, No. 2 : 99 - 112
- Paterson, Stephanie, 2009. "(Re) Constructing Women's Resistance to Woman Abuse : Resources, Strategy Choice, and Implications of and for Public Policy in Canada". *Critical Social Policy*, Volume 29 (1)
- Pos Kupang : <http://kupang.tribunnews.com>
- Rao, Manisha, 2012. "Ecofeminism at the Crossroads in India : A Review". *DEP* No. 20 / 2012
- Salman, Aneel, 2007. "Ecofeminist Movement : From the North to the South." *The Pakistan Development Review* 46:4 Part II (Winter 2007), pp

- Scott, James C., 1981. *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta. LP3ES
- Scott, James C., 1985. *Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven and London. Yale University Press
- Scott, James C., 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Shiva, Vandana, 1989. *Staying alive : Women, Ecology and Development*. London. Zed Books.
- Sudaryanto, T dan Prajogo U. Hadi, 2009. "Analisis Dampak Pencabutan Subsidi Ekspor Kapas Negara Maju Terhadap Ekonomi Kapas Indonesia" dalam *Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Hal. 1-19.
- Sukeni, Ni Nyoman, 2006. Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Bali.
- Timor Express : <http://www.timorexpress.com>
- Wellem, F.D., 2004. *Injil dan Marapu : suatu studi historis-teologis tentang perjumpaan Injil dan masyarakat Sumba pada periode 1876 – 1990*. Cet.1. Jakarta. Gunung Mulia
- Widiastiti, Anak Agung Istri Putera, 2012. Resistensi Perempuan Bali pada Sektor Industri Kreatif di Desa Pasekbali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. E-jurnal Kajiann Budaya Universitas Udayana, Vol.1, No.1, Desember 2012, hal. 1 -10
- Wulan, Tyas Retno, 2007. Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. April 2007, hal. 105 – 130.
- World Commission on Environment and Development (WCED), 1987. *Our Common Future*. Oxford University Press: Oxford.
- Catatan Belakang**
- 1 Sebenarnya definisi tentang pertanian lahan kering masih diperdebatkan. Namun Benu (2012) menyatakan bahwa dalam konteks makro, semua usaha budidaya pertanian pada daerah dengan tipologi *semi-arid* sampai dengan *arid* dikategorikan sebagai usaha pertanian lahan kering.
 - 2 Menurut Mudita (2010), kata *arid* dalam konteks iklim digunakan untuk menyatakan keadaan yang merujuk pada suatu ratio rerata presipitasi tahunan (meliputi curah hujan, embun, salju) terhadap evapotranspirasi potensial tahunan (meliputi penguapan dari badan perairan terbuka dan penguapan dari makhluk hidup).
 - 3 Dalam bidang ilmu antropologi, kelompok masyarakat dengan karakteristik seperti itu disebut sebagai masyarakat *agro-pastoralist* yang umumnya dapat ditemukan di Afrika.
 - 4 <http://202.146.4.119/read/artikel/29867>
 - 5 FloresNews.com; BNI Securities
 - 6 <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/30059/pemprop-ntt-dukung-pengembangan-kapas-di-sumba>
 - 7 FloresNews.com; BNI Securities
 - 8 Ada perbedaan isu lingkungan yang dihadapi perempuan di NSB dan negara maju. Pada masyarakat non-industri, masalah lingkungan yang dihadapi umumnya adalah akses pada air bersih dan sumber daya lainnya, selain isu kemiskinan dan kesehatan. Sedangkan pada masyarakat industri/negara maju, masalah lingkungan tidak selalu dapat dirasakan dan nampak jelas. Kerusakan alam di negara-negara maju lebih tersembunyi (Salman, 2007)
 - 9 *Chipko* adalah bahasa India yang artinya memeluk.
 - 10 Bahasa Belanda untuk pegawai VOC yang ditugaskan di suatu tempat untuk mengawasi daerah tersebut.
 - 11 Menurut Wielenga (1916, dalam Wellem, 2004) tidak ada orang di Sumba yang membuka kebun kapas karena takut dirampok dan karena seringnya terjadi peperangan.
 - 12 <http://www.waingapu.com/disbun-sumtim-dampingi-warga-kembangkan-kapas.html>
 - 13 <http://www.waingapu.com/mentan-panen-kapas-perdana-didampingi-lula-kamal.html>
 - 14 Selain menjadi lokasi demplot, Desa Tanamanang juga menjadi salah satu desa yang melaksanakan PAKN. Ada 2 kelompok tani lainnya yang menerima bantuan sosial benih kapas pada Tahun 2008.
 - 15 "obat hama" adalah istilah umum yang digunakan petani untuk pestisida. Informan rata-rata tidak mengenal nama "obat hama" itu dan hanya menyebutkan bahwa "obat hama" itu ada gambar tengkorak di botolnya.
 - 16 Di tempat lain di Sumba Timur, *kamba jawa* juga digunakan sebagai bahasa lokal yang menunjuk pada tanaman kapok (randu)
 - 17 Dalam upaya mengurangi ketergantungan impor kapas, sejak tahun 1979 pemerintah pusat telah melakukan usaha peningkatan produksi kapas dalam negeri melalui program Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR). Program IKR ini juga dilaksanakan di Pulau Sumba pada sekitar tahun 1980-an

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: "Tiga Tubuh Tanah"	iii-iv
Artikel / Article	
<ul style="list-style-type: none"> • Teologi Ekofeminis Pembebasan dari Porong: Kajian Puisi Anak-Anak Korban Lapindo / <i>Ecofeminist and Freedom Theology from Porong: a Study on Poetries Compilation by Children of Lapindo's Victims</i> 	1-8
<i>Mutiara Andalas, SJ</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman Kerusakan Ekologis Produksi Batik Rumahan: Narasi Perlindungan Ruang Domestik • <i>Threat of Ecological Destruction in Home-Based Batik Production: a Narrative of Protecting Domestic Sphere</i>..... 	9-20
<i>Arianti Ina Restiani Hunga</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Goddess, Ketubuhan dan Alam: Kajian Spiritualitas Ekofeminisme / <i>Goddess, Corporeality and Nature: Study of Ecofeminist Spiritualism</i>..... 	21-28
<i>Gadis Arivia</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketegangan Ruang Privat dan Publik dalam Penyelamatan Ekologi: Negara, Perusahaan dan Perempuan Adat / <i>Tension between Private and Public Sphere in Saving Ecology: State, Companies and Indigenous Women</i> 	29-36
<i>Donny Danardono</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Perlawanan Perempuan dalam Industri Kapas: Kajian Kerusakan Lingkungan di Sumba Timur / <i>Women's Resistance in Cotton Industry: a Study of Ecological Destruction in East Sumba</i> 	37-49
<i>R.L.K.R. Nugrohowardhani</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan Ekologi Kota: Narasi Buruh dan Pekerja Informal Perempuan / <i>Vulnerability of City Ecology: a Narrative of Female Labors and Informal Workers</i> 	51-58
<i>Akhmad Ramdhon</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketika Banteng-Banteng Tak Lagi Minum Air di bawah Pohon Keningar: Pandangan Dunia Perempuan Lereng Gunung Merapi / <i>When Bulls No Longer Drink Water under Keningar Trees: Women's Worldview at Mount Merapi ...</i> 	59-66
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • Siti Maemunah: Filosofi Tanah sebagai Tubuh Perempuan: Krisis Lingkungan akibat Tambang / <i>Siti Maemunah: Land Philosophy as Women's Body: Ecological Crisis due to Mining</i>..... 	67-74
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono & Naristi Aulia</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
75-76	
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia dalam Kajian Ekofeminisme Multidisipliner / <i>Indonesia Under the Eyes of Multidisciplinary Ecofeminist Studies</i>..... 	77-79
<i>Ngadiyo</i>	

